

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN BANTUAN
REHABILITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2011
DI DESA TELUK SIANTAN KECAMATAN SIANTAN TENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru



Oleh

KHORI
10975005865

PROGRAM SI

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU
RIAU
2013**

ANALISIS PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA TELUK SIANTAN KECAMATAN SIANTAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

ABSRTRAK

OLEH

KHORI

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan salah satu program bantuan sosial Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah terhadap masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi starter pada masyarakat agar dapat memicu semangat dalam upaya, mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh langsung dari hasil angket dan wawancara yang ditetapkan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama, melalui dokumen-dokumen, papan data di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, buku-buku dan hasil penelitian lainnya Dengan menggunakan indicator PERBUB Nomor 7b Masyarakat menilai baik sebanyak 264 orang dengan persentase 36.21%, Cukup baik sebanyak 288 dengan persentase 39.51% dan yang menilai tidak baik adalah 177 orang dengan persentase 24.26%, maka pelaksanaan bantuan ini harus lebih ditingkatkan lagi dan begitu juga dengan seluruh elemen yang ada harus ikut berpartisipasi agar bisa menghasilkan yang lebih maksimal lagi kedepannya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi manusia kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar (basic need), di samping kebutuhan akan sandang dan pangan.

Tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tempat tinggal yang layak, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan akan sandang dan pangan, meskipun kenyataanya terdapat peringkat pemenuhan akan kebutuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas.

Teori maslow menyebut bahwa sesudah manusia terpenuhi kebutuhan jasmaninya, yaitu sandang, pangan, dan kesehatan, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan lebih tinggi lagi. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi kehidupan manusia atau keluarga dalam melansungkan kehidupannya.

Perumahan merupakan pencerminan dan penjelasan secara mendetail tentang diri pribadi manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam kebersamaan di dalam masyarakat. Dengan demikian perumahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, dan merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Jadi jika ditinjau dari proses bermukim,

rumah merupakan sarana untuk berlindung dari alam, memberi ketentraman hidup dan pusat kegiatan budaya. Di rumah dan lingkungan lah dibentuk kepribadian manusia, maka dari itu diperlukan perumahan yang aman, nyaman, dan tentram. Rumah Sederhana yaitu rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal dan cara hidup.

Adapun dalam suatu perumahan harus mempunyai sarana yang dapat mendukung kegiatan penghuni perumahan tersebut, sehingga penghuni perumahan tersebut mendapat kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam melaksanakan aktivitas. Perumahan Sehat Sederhana adalah suatu alternatif untuk menyediakan rumah bagi kalangan masyarakat kalangan menengah kebawah. Hal ini disebabkan naiknya harga-harga sehingga mempengaruhi harga jual perumahan. Rumah sederhana sehat tidak hanya menekankan pada penghematan material saja tapi masih mempertimbangkan kelayakan huni dari perumahan tersebut.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi

pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.(Menteri Perumahan Rakyat: JAKARTA_MICOM 2012).

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program pembangunan layak huni telah banyak dikembangkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari harapan.

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan salah satu program bantuan sosial Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini di mulai pada tahun 2011 yang mana bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 kepada setiap penerimanya. Walaupun bantuan tersebut tidak sepenuhnya bisa membiayai rumah yang akan di perbaiki, namun bantuan tersebut diharapkan menjadi starter bagi masyarakat untuk menciptakan rumah yang layak huni.

Anggaran Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2011.

Berdasarkan PERBUB Nomor 7 Tahun 2011 adapun kriteria-kriteria keluarga yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah :

- 1) Berdomisili di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuktikan dengan KTP/KK/identitas diri yang berlaku
- 2) Keluarga rumah tangga miskin dan tidak mampu
- 3) Rumah yang akan direhab berada di wilayah kabupaten kepulauan anambas
- 4) Memiliki rumah diatas lahan sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang
- 5) Kondisi rumah memperhatikan sehingga tidak layak untuk dihuni baik secara estetika maupun fisiknya
- 6) Khusus rumah yang berada dipesisir pantai / tepi laut diharuskan ada surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat

7) Bagi masyarakat yang tanahnya menumpang pada orang lain / badan usaha boleh diberikan bantuan rumah tidak layak huni dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan tidak keberatan rumah tersebut diperbaiki
- b. Pemilik lahan tidak boleh menerima sewa
- c. Pemilik lahan tidak boleh menjual, menghibahkan atau memindahkan hak atas tanah kepada orang lain minimal 5 tahun setelah rumah diperbaiki
- d. Persyaratan tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat

Kepala Keluarga penerima bantuan dengan membentuk kelompok dengan anggota berjumlah 5 sampai dengan 10 Kepala Keluarga yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Tugas kelompok adalah :

- 1) Membentuk pengurus kelompok terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, dan mengusulkan kepada kepala desa/Lurah untuk ditetapkan serta membuat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- 2) Membuka rekening kelompok penerima sasaran di bank atau kantor pos
- 3) Melakukan penilaian bagian rumah yang akan direhabilitasi.
- 4) Menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang.
- 5) Mengusulkan pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang).
- 6) Mengajukan usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang

- 7) Membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok.
- 8) Ketua kelompok membuat laporan akhir kegiatan yang dilampiri foto-foto masing-masing rumah yang telah direhab dan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan

Beberapa prinsip dalam pelaksanaan bantuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

1. Kesetiakawanan sosial

Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

2. Keadilan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskrimatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.

3. Kemanfaatan

Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ ruang/ kondisi yang diperbaiki atau diganti.

4. Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

5. Keberpihakan kepada orang miskin

Mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya.

6. Transparansi

Bahwa kegiatan Program Rehabilitasi rumah layak huni ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat khususnya sasaran penerima program.

7. Partisipasi

Masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan.

8. Desentralisasi

Masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negative dari luar.

9. Akuntabilitas

Setiap pengelolaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Didalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni hendaknya pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, agar bantuan tersebut tepat sasaran yaitu tepat kepada orang yang membutuhkan.

Tabel I.1 : Daftar pemohon bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Nama Bakal calon Penerima Bantuan	Pekerjaan	Penghasilan/bulan
1	Ajenah	Petani	1.500.000.-1.700.000
2	Adi R.	Nelayan	1.500.000.-1.700.000
3	Buslim	Nelayan	1.500.000.-1.700.000
4	Ibrahim	Petani	900.000.-1.100.000
5	Iskandar	Buruh	1.500.000.-1.700.000
6	Abdul Satar	Buruh	900.000.-1.100.000
7	Ahmad	Petani	900.000.-1.100.000
8	Musa	Nelayan	1.200.000.-1.400.000
9	M. Sani	Nelayan	900.000.-1.100.000
10	Syarif	Nelayan	1.500.000.-1.700.000
11	Andi	Petani	1.500.000.-1.700.000
12	Adli	Buruh	900.000.-1.100.000
13	Zainal Abidin	Buruh	1.500.000.-1.700.000
14	Azam	Petani	1.500.000.-1.700.000
15	Amir Husin	Nelayan	900.000.-1.100.000
16	M. Din	Nelayan	900.000.-1.100.000
17	Liwardi	Nelayan	1.500.000.-1.700.000
18	Sabarni	Petani	1.500.000.-1.700.000
19	Naziruddin	Nelayan	1.800.000.-2.000.000
20	Mukti	Petani	900.000.-1.100.000
21	Tifah	Petani	1.500.000.-1.100.000
22	Syariudin	Nelayan	900.000.-1.100.000
23	Sarinah	Petani	1.200.000.-1.400.000
24	Lukman	GTT	2.100.000
25	Rozak Norman	Nelayan	900.000.-1.100.000
26	Halimah	Petani	1.200.000.-1.400.000
27	Afandi	Nelayan	900.000.-1.100.000

Sumber: Kantor Kepala Desa Teluk Siantan tahun 2011

Dari data di atas dapat di lihat calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2011 yang diajukan ke dinas sosial berdasarkan rekomendasi dari kepala Tesa teluk Siantan.

Namun berbeda dari data yang diperoleh dari kantor Dinas Sosial bahwa nama-nama yang diajukan sebanyak 27 tujuh orang hanya 7 orang yang

mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Daftar penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No	Penerima bantuan	Pekerjaan	Penghasilan/bulan	Jumlah bantuan
1	Tifah	Petani	1.500.000-1.700.000	20.000.000,00
2	Abdul satar	Buruh	900.000.-1.100.000	20.000.000,00
3	Musa	Nelayan	1.200.000.-1.400.000	20.000.000,00
4	Amir husin	Nelayan	900.000.-1.100.000	20.000.000,00
5	Mukti	Petani	900.000.-1.100.000	20.000.000,00
6	Lukman	GTT	2.100.000	20.000.000,00
7	M. sani	Nelayan	900.000-1.100.000	20.000.000,00

Sumber: Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011

Dari tabel diatas terlihat sangat jelas bahwa nama-nama penerima bantuan rumah rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Teluk Siantan berjumlah 7 orang. Hal itu sangat jauh dari harapan yang mana di dalam pengajuan nama-nama calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni berjumlah 27 orang. Dan juga terdapat nama-nama yang seharusnya belum mendapatkan bantuan tetapi menjadi dapat bantuan hal itu bisa terlihat jelas dari penghasilan perbulanya.

Berdasarkan data diatas penulis menemukan adanya fenomena-fenomena didalam pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai berikut:

1. Belum meratanya penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hal itu terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Padahal kalau dilihat dari segi penghasilan dan kerusakan nama-nama calon penerima diatas telah layak untuk mendapatkan bantuan karena bantuan ini sangat dibutuhkan.

2. Belum tepatnya sasaran didalam pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. hal ini terlihat dari ada rumah yang belum layak mendapatkan bantuan menjadi mendapatkan bantuan, padahal kalau dilihat dari segi penghasilan penerima tersebut belum layak mendapatkan bantuan, masih ada penerima yang mempunyai penghasilan yang lebih rendah.
3. Kurangnya pengawasan dari dinas sosial sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat guna hal ini terlihat dari rumah yang mendapatkan bantuan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Uraian di Atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “*Analisis Pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2011 di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah. “Bagaimana pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas”?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah

“Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas.”

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bahan masukan bagi pemerintah dan instansi dinas sosial khususnya dalam mengambil kebijakan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Sebagai penambahan ilmu pengetahuan bagi penulis terhadap pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusun hasil penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini berisikan penguraian dari teori-teori dan definisi konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti seperti Kebijakan Publik, Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni, Kelembagaan, Pembangunan, Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak

Layak huni, Pandangan Islam tentang tolong menolong, Konsep Operasional, Teknik pengukuran, Hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang penelitian yang meliputi: Sejarah Desa Teluk Siantan, Letak Geografis Desa Teluk Siantan, Jumlah Penduduk Desa Teluk Siantan Dan Struktur Dinas Sosial.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan identitas responden, distribusi jawaban responden terhadap pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas. Serta membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran yang dapat penulis berikan kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah.

Menurut **Thomas R.Dye**, (dalam Inu Kencana 1999:106) kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu.

Menurut **Willy N. Dunn**, (dalam inu Kencana 1999:107) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Selanjutnya **Inu Kencana (1999 : 105)** menyatakan bahwa kebijakan (policy) dalam pemerintahan hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan penjawatan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak

melakukan dan diimplementasikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan Negara. Kebijakan publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Menurut **Inu Kencana (1999:108)** ada beberapa model yang digunakan dalam pembuatan public policy sebagai berikut:

1. Model Elite

yaitu pembentukan public policy hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. Walaupun pada kenyataannya mereka sebagai preference dari nilai-nilai elit tertentu, tetapi mereka masih saja berdalih merefleksikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Karena itu mereka cenderung melakukan pengendalian dengan kontinu, dengan perubahan-perubahan hanya bersifat tambal sulam. Masyarakat banyak dibuat sedemikian rupa tetap miskin informasi.

2. Model kelompok

Yaitu pembuatan public policy yang terdapat beberapa kelompok kepentingan (interest group) yang saling berebutan mencari posisi dominan.

3. Model kelembagaan

Yaitu pembentukan public polisy yang dikuasai oleh lembaga-lembaga pemerintah, dan sudah barang tentu lembaga tersebut adalah satu-satunya yang dapat memaksa serta melibatkan semua pihak.

4. Model proses

Model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul, pengesahan kebijaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya.

5. Model rasialisme

Model ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara efesien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk menghasilkan hasil bersihnya.

6. Model inkrementalisme

Model ini berpatokan pada kegiatan masa lalu, dengan sidikit perubahan. Artinya model ini tidak banyak bersusah payah, tidak banyak resiko, perubahanya tidak radikal, tidak ada konflik yang meninggi, kestabilan terpelihara, tetapi tidak berkembang (konsertatif) karena hanya menanmbah dan mengurangi yang sudah ada.

7. Model system

Model ini beranjak dari memperlihatkan desakan-desakan lingkungan, antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan, dan lain sebagainya yang mempengaruhi *public policy*

Dalam rangka pencapaian kesesuaian antara tujuan dan sasaran kebijakan dengan kenyataan dilapangan, Jan Merse (dalam Hesel Nogi S. Tangkilsan 2002:100) mengidentifikasikan fakto-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:

a. Informasi

Informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman, visi dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Informasi akan mengalir secara efektif jika sekelompok orang yang bekerja sama saling peduli dan terbuka. Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya.

b. Isi kebijakan

Mengingat kebijakan public merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan public, maka isi dari kebijakan dimaksud akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung

memuat-memuat politik yang akan mengakomodir kepentingan seluruh stakeholders.

c. Dukungan

Dukungan yang digunakan disini adalah dukungan fisik maupun non fisik, apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Dukungan yang dimaksud disini berkaitan kuat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholders dalam proses pelaksanaan program.

d. Pembagian potensi

Elemen pembagian potensi pada dasarnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan karena setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan

2.2 Pengertian Rumah Layak Huni

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman disebutkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. Terkait dengan fasilitas-fasilitas yang akan diperbaiki dari program renovasi rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat, bahwa rumah yang sehat harus mempunyai fasilitas-fasilitas. Pertama penyediaan air bersih yang cukup, pembuangan tinja, pembuangan

limbah (air bekas), pembuangan sampah, fasilitas dapur, ruang berkumpul dengan keluarga dan untuk rumah dipedesaan lebih cocok adanya serambi (serambi depan dan belakang). Dan untuk yang memiliki ternak, sebaiknya anatar rumah dengan kandang ternak jaraknya harus terpisah untuk menjaga kesehatan.

Menurut **Depkes RI (2002)**, rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat yaitu;

- a. Dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, pengahawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.
- b. Dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah.
- c. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas dari penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan pengahawaan yang cukup.
- d. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun keadaan dalam rumah, antara lain; posisi garis sepadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir.

2.3 Rumah Tinggal Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknismaupun non teknis. Persyaratan tersebut terdiri dari 9 kriteria khusus.

Rumah tidak layak huni selalu berkaitan dengan aspek kemiskinan karena keterjangkauannya bagi masyarakatnya terhadap rumah. Adapun 9 kriteria khusus yang dikatakan sebagai rumah tidak layak huni, yaitu:

1. Luas lantai per kapita kota kurang dari empat meter persegi (4 m^2), desa kurang dari 10 m^2 .
2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas.
3. Tidak ada akses MCK.
4. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, papan, rumbia.
5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
6. Tidak memiliki pembagian ruangan.
7. Lantai dari papan bahan tidak permanen ataupun lantai dari tanah.
8. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan.
9. Kondisi rusak. Ditambah lagi dengan, saluran pembuangan air yang tidak memenuhi standar.

2.4 Kelembagaan

Pengertian kelembagaan **Douglass** (Dalam Siagian, 1990) adalah sebagai sebuah peraturan dalam sebuah permainan dalam masyarakat atau lebih khusus dalam sistem tata nilai yang membatasi hubungan antar manusia, jadi mengatur hubungan dan interaksi antara komponen yang ada didalam masyarakat. **Anthonandy** (dalam Siagian, 2006) kelembagaan didefinisikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap aspek apa dan bagaimana mekanisme kerjanya dari masing-masing yang dilaksanakan. Perangkat kelembagaan dalam dibidang perumahan merupakan satu kesatuan

sisitem untuk mewujudkan pembangunan perumahan secara berencana, terarah dan terpadu baik yang berfungsi sebagai pemegang kebijakan, pembinaan dan pengaturan pada berbagai tingkat pemerintah maupun lembaga pelaksana pembangunan disektor pemerintah dan swasta

Sedangkan **Siagian dan Purwoko (2007)** Lembaga dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman adalah pertama sebagai pembuat kebijakan dan strategi dan program pembangunan perumahan dan permukiman secara nasional, kedua peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga pemerintah sebagai *provider* dan *enabler*. **World Bank (1993:4)** dalam pemecahan masalah dari segi pembangunan perumahan yang harus diperhatikan adalah pemerintah harus menyiapkan prasarana dalam menentukan lahan perumahan dan bertanggung jawab terhadap penyediaan prasarana dan rasaran di daerah perumahan, biaya dan peraturan perkotan, dan menciptakan potensi kompetitif dalam pengembangan dan penggunaan lahan..

2.5 Pembangunan

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan materill. Pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sekelompok masyarakat di bidang ekonomi. Pembangunan sering dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Menurut **Siagian (2005:142)** pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat modern. Maka tidak ada satu Negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan.

Selanjutnya **Riady (2003:322)** langkah-langkah di dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh di dalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan:

- a. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan diwujudkan melalui upaya pembangunan
- b. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuat alternative perumusan dari berbagai keinginan tersebut
- c. Meracncang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan ini
- d. Proses perencanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan Serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkan seluruh instansi dan maupun pameran pembangunan yang terkait
- e. Melaksanakan program pembangunan disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sempat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkan. Disamping masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut.

2.6 Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni

Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan yang ditujukan rumah yang sudah tidak layak lagi untuk ditempati karena sudah terlalu banyak kerusakan pada rumah tersebut. Adapun tujuan dari Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan PERBUB Nomor 7 Tahun 2011 yaitu :

1. Menciptakan kondisi sosia yang mendukung terwujudnya lingkungan pepermukiman yang layak.
2. Meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainya dalam penanganan kawasan/lingkugan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar.
3. Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuam keluarga dan melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan linkungan permukiman keluarga fakir miskin.

6. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan lingkungannya
7. Masyarakat penerima sasaran program bantuan Rehabilitas RLTH diberikan kewenangan untuk melaksanakan Rehabilitasi terhadap rumah mereka baik secara perorangan maupun kelompok (gotong royong), hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Anambas ditujukan kepada Rumah Tangga Miskin yang rumahnya tidak wajar untuk di huni lagi. Hal ini dapat terlihat dari kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan Perbub Nomor 7 tahun 2011 adapun kriteria-kriteria keluarga yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah :

- 1) Berdomisili di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuktikan dengan KTP/KK/identitas diri yang berlaku
- 2) Keluarga rumah tangga miskin dan tidak mampu
- 3) Rumah yang akan direhab berada di wilayah kabupaten kepulauan anambas
- 4) Memiliki rumah diatas lahan sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang
- 5) Kondisi rumah memprihatinkan sehingga tidak layak untuk dihuni baik secara estetika maupun fisiknya

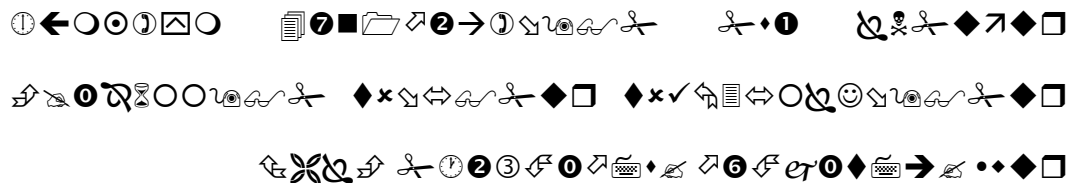
- 6) Khusus rumah yang berada dipesisir pantai / tepi laut diharuskan ada surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa yang diketahui camat
- 7) Bagi masyarakat yang tanahnya menumpang pada orang lain / badan usaha boleh diberikan bantuan rumah tidak layak huni dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pemilik lahan tidak keberatan rumah tersebut diperbaiki
 - b. Pemilik lahan tidak boleh menerima sewa
 - c. Pemilik lahan tidak boleh menjual, menghibahkan atau memindahkan hak atas tanah kepada orang lain minimal 5 tahun setelah rumah diperbaiki
 - d. Persyaratan tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat

Kepala Keluarga penerima bantuan dengan membentuk kelompok dengan anggota berjumlah 5 sampai dengan 10 Kepala Keluarga yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Tugas kelompok adalah :

1. Membentuk pengurus kelompok terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, dan mengusulkan kepada kepala desa/Lurah untuk ditetapkan serta membuat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Membuka rekening kelompok penerima sasaran di bank atau kantor pos
3. Melakukan penilaian bagian rumah yang akan direhabilitasi.
4. Menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang.
5. Mengusulkan pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang).

6. Mengajukan usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang
7. Membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok.
8. Ketua kelompok membuat laporan akhir kegiatan yang dilampiri foto-foto masing-masing rumah yang telah direhab dan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan

2.7 Pandangan Islam tentang tolong menolong



Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”(Q.S Al-Israa’ : Ayat 26)

Pada ayat diatas sangat jelas bahwa allah SWT memerintahkan agar memberikan haknya kepada orang yang miskin. Karena ada sebagian harta kita milik orang miskin yang mana harta tersebut harus kita salurkan kepada yang membutuhkan. Ayat diatas juga mempunyai konsep bahwa kita harus menyalurkan sesuatu harus tepat pada sasaran bukan kepada keluarga kita, tetapi kepada keluarga yang membutuhkan yaitu orang miskin yang butuh pertolongan.



Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.(Q.S An-Nisaa: Ayat 36.)

Ayat diatas menganjurkan kita supaya berbuat baik baik itu pada keluarga maupun pada tetangga kita, baik yang dekat maupun yang jauh, ayat diatas juga menganjurkan kita agar bersikap adil, baik itu dengan tetangga maupun dengan hamba sahaya.

2.8 Konsep Operasional

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu variable yaitu:

Pelaksanaan program yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu program untuk mencapai suatu tujuan.

Indikator dari pelaksanaan adalah

1. Kesetiakawanan sosial

Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

2. Keadilan

Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskrimatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.

3. Kemanfaatan

Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ ruang/ kondisi yang diperbaiki atau diganti.

4. Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

5. Keberpihakan kepada orang miskin

Mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya.

6. Transparansi

Bahwa kegiatan Program Rehabilitasi rumah layak huni ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan

besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat khususnya sasaran penerima program.

7. Partisipasi

Masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan.

8. Desentralisasi

Masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negative dari luar.

9. Akuntabilitas

Setiap pengelolaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati

Tabel 2.1 : Operasional Variabel

Konsep	Variabel dimensi	Indikator	Sub indikator/item yang dinilai	Skala pengukuran
1	2	3	4	5
Menurut PERBUB bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan yang ditujukan rumah yang sudah tidak layak lagi untuk ditempati karena sudah terlalu banyak kerusakan pada rumah tersebut.	Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan PERBUB adalah Bantuan yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang rumahnya tidak memenuhi standar untuk dihuni secara wajar	1.Kesetiakawanan sosial	a. Dilandasi kepedulian sosial terhadap yang membutuhkan b. Dilandasi dengan empati terhadap yang membutuhkan c. Dilandasi dengan kasih sayang terhadap yang membutuhkan	Baik Kurang Baik Tidak Baik
		2.Keadilan	a. Pemerataan b. Tidak diskrimatif c. Seimbang antara hak dan kewajiban	Baik Kurang Baik Tidak Baik
		3.Kemanfaatan	a. Berguna bantuan bagi masyarakat b. Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan dan fungsi dari barang atau runag kondisi yang diperbaiki	Baik . Kurang Baik Tidak Baik

			c. Berguna bagi kesejahteraan	
		4.Keterpaduan	a. Peran aktif pemerintah b. Peran aktif dari masyarakat c. Peran aktif dari penerima bantuan	Baik Kurang Baik Tidak Baik
		5.Keberpihakan terhadap orang miskin	a. Di berikan tepat kepada yang membutuhkan b. Memberikan manfaat kepada yang membutuhkan c. Memberikan hasil terhadap yang membutuhkan	Baik Kurang Baik Tidak Baik
		6.Transparansi	a. Transparan saat survey b. Transparan bantuan yang diberikan c. Transparan dalam pelaksanaan bantuan	Baik Kurang Baik Tidak Baik
		7.Partisipatif	a. Berperan dalam perencanaan b. Berperan dalam pelaksanaan c. Berperan dalam pengawasan	Baik Kurang Baik Tidak Baik
		8.Dentralisasi	a. Masyarakat memiliki kewenangan untuk mengelola pembangunan b. Masyarakat	Baik . Kurang Baik Tidak Baik

			bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri	
			c. Masyarakat berwenang melaksanakan pembangunan tanpa intervensi dari luar	
		9. Akuntabilitas	a. Dapat dipertanggungjawabkan setempat b. Dapat dipertanggungjawabkan terhadap pihak yang terkait c. Dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Undang-undang.	Baik Kurang Baik Tidak Baik

2.9 Teknik Pengukuran

Indikator yang diukur adalah:

1) Kesetiakawanan sosial

Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Baik : Apabila pelaksanaannya dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang

Kurang baik : Apabila pelaksanaannya kurang dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Tidak baik : Apabila pelaksanaannya tidak dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

2) Keadilan

menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskrimatif dan seimbang antara hak dan kewajiban

Baik : Apabila pelaksanaannya menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskrimatif dan seimbang antara hak dan kewajiban

Kurang baik : Apabila pelaksanaannya kurang menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskrimatif dan seimbang antara hak dan kewajiban

Tidak baik : Apabila pelaksanaannya tidak menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskrimatif dan seimbang antara hak dan kewajiban

3) Kemanfaatan

Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ ruang/ kondisi yang diperbaiki atau diganti.

Baik : Apabila pelaksanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.

Kurang baik : Apabila pelaksanaannya kurang dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.

Tidak baik : Apabila pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.

4) Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Baik : Apabila pelaksanaannya mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Kurang baik : Apabila pelaksanaannya kurang mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Tidak baik : Apabila pelaksanaannya tidak mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

5) Keberpihakan kepada orang miskin

Mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya.

Baik : Apabila pelaksanaannya mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya.

Kurang baik : Apabila pelaksanaannya kurang mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya..

Tidak baik : Apabila pelaksanaannya tidak mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

6) Transparansi

Bahwa kegiatan Program Rehabilitasi rumah layak huni ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat khususnya sasaran penerima program.

Baik : Apabila pelaksanaannya terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Kurang baik : Apabila pelaksanaannya kurang terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Tidak baik : Apabila pelaksanaannya tidak terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

7) Partisipasi

Masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan.

Baik : Apabila pelaksanaannya masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan.

Kurang baik : Apabila pelaksanaannya masyarakat kurang berperan aktif dalam setiap kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan.

Tidak baik : Apabila pelaksanaannya masyarakat tidak berperan aktif dalam setiap kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan.

8) Desentralisasi

Masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negative dari luar.

Baik : Apabila pelaksanaannya masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negative dari luar.

Kurang baik : Apabila pelaksanaannya masyarakat kurang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negative dari luar.

Tidak baik : Apabila pelaksanaannya masyarakat tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa itervensi negative dari luar.

9) Akuntabilitas

Setiap pengelolaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Baik : Apabila pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Kurang baik : Apabila pelaksanaannya kurang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Tidak baik : Apabila pelaksanaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2.10 Hipotesa

Hipotesis adalah prinsip yang logis dan diterima secara rasional tanpa mempercayai sebagai kebenaran sebelum diuji kebenarannya. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan perumusan masalah serta kerangka teori, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah “Diduga Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Belum berjalan dengan baik”

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun waktu penelitian ini berlangsung dari bulan November 2012 sampai dengan Januari 2013

3.2 Jenis dan Sumber Data

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh langsung dari hasil angket dan wawancara yang ditetapkan.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama, melalui dokumen-dokumen, papan data di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, buku-buku dan hasil penelitian lainnya

3.3 Populasi dan Sampel

a Populasi

Menurut **Sugiono (2003:90)** Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subject/object yang memiliki kualitas dan kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berjumlah 27 orang . dan seluruh anggota pelaksana RTLH desa teluk siantan 5 orang.

Table 3.1 Jumlah Populasi Penelitian di Desa Teluk Siantan

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase %
1	Kepala Dinas Sosial	1	1	100
2	Sekretaris	1	1	100
3	Kepala desa	1	1	100
4	Pemdamping	1	1	100
5	Ketua kelompok	1	1	100
6	Masyarakat	27	27	100
	Jumlah	32	32	100

b Sampel

Menurut **Sugiono (2003 : 91)** sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sensus, yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan cara:

- a) Observasi (pengamatan), yaitu melakukan pengamatan/tinjauan dilokasi penelitian di Desa Tluk Siantan tentang pendistribusian rumah layak huni.

- b) Interview (wawancara) yakni dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, sifat wawancara ini adalah wawancara terstruktur dimana daftar pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.
- c) Daftar pertanyaan (kuesioer) yakni dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab sesuai dengan apa yang dialami atau diketahui.
- d) Dokumentasi yakni dengan mengumpulkan data berupa photo-photo.

3.5 Analisis Data

Sebuah data dan segala bahan-bahan yang dibutuhkan terkumpul, penulis memisahkan dan mengelompokkan menurut jenisnya dan disajikan dalam bentuk table frekuensi dan prosentase. Dalam penelitian ini data dianalisa secara deskriptif analitis yakni memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dan diiringi dengan uraian dan penjelasannya berdasarkan data hasil penelitian, serta melakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan dilapangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Teluk Siantan

Nama Teluk Siantan diambil dari nama sebuah karamat di wilayah tersebut, yaitu Keramat Siantan. Keramat siantan ini di perkirakan sudah lama ada sebelum Desa Teluk Siantan ada. Keramat ini bentuknya seperti kapal , kapal ini kononnya kapal para orang kerajaan yang terdampar , dan kini sudah menjadi salah satu tempat wisata di Kabupaten Kepulaun Anambas .

Sewaktu masih dalam Bagian Desa Air Asuk sebelum pemekaran Desa Teluk Sianta mempunyai nama Dusun Air Nangak kemudian ada perubahan setelah pemekaran nama menjadi teluk siantan, yang daerahnya tidak terlalu luas. Memiliki wilayah teluk siantan saja. Dengan berlalunya waktu yang panjang dan banyak pendatang dari berbagai macam kalangan, maka daerah ini semakin ramai penghuninya.

Berdasarkan cerita diatas Desa Teluk Siantan semakin bertambah penduduknya hingga saat sekarang dan secara administrasi Desa Teluk Siantan terbentuk sejak tahun 1998 hingga saat ini sudah terjadi 3 kali pergantian

penghulu atau Kepala Desa. Dan masa kepengemimpinan mereka adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1998-1999 : Burhanudin
2. Tahun 2000-2005 : Sardian
3. Tahun 2006 s/d sekarang : Deni Saputra

4.2 Letak Geografis Desa Teluk Siantan

Desa Teluk Siantan berada di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempunyai luas 94.540 yang terdiri dari 6 rukun warga dan 15 rukun tetangga dengan jumlah penduduk 2.127 jiwa yang terdiri dari 533 kepala keluarga (kk).

Adapun batas-batas wilayah dari Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah yaitu:

1. Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Teluk Sunting
2. Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Air Sena
3. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Antang
4. Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Air Asuk

4.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur

Bila dilihat dari tingkat umur penduduk di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah, maka dapat dibagi menjadi lima tingkatan, sebagai mana dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur Di Desa Teluk Siantan

No	Tingkat Umur	Jumlah	Peresentase (%)
1	0-5 Tahun	286 orang	13,44%
2	6-16 Tahun	571 orang	26,84%
3	17-25 Tahun	453 orang	21,29%
4	26-55 Tahun	605 orang	28,44%
5	56 Keatas	212 orang	9,96%
Jumlah		2.127 orang	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Teluk Siantan, 2012

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Teluk Siantan adalah orang dewasa yang berumur 26-55 tahun yaitu 605 orang (28.44%). sedangkan yang peling sedikit penduduknya adalah yang sudah lanjut usia (LANSIA) yaitu 212 orang yang dengan (9.96%)

4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin

Penduduk Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah dilihat dari jenis kelaminnya sebagai mana dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Teluk Siantan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	jumlah	Presentase (%)
1	Laki- laki	1.074 orang	50,49%
2	Perempuan	1.053 orang	49,50%
Jumlah		2,127 orang	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Siantan, 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang di dominasi oleh mereka yang berjenis kelamin Laki-laki dengan jumlah 1074 orang (50,49%) sedangkan mereka yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1053 orang (49,50%). Jadi dari data yang diperoleh menunjukan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan.

4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari Manusia. Kebebasan beragama dinegara Republik Indonesi dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29.sikap yang perlu dikebangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adlah toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencapur adukan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat Desa Teluk Siantan adalah beragama Islam. Walaupun Islam sebagai mayoritas, tidak ada penekanan atau pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama yang minoritas.

Hal ini telah membuktikan mantapnya toleransi antara umat beragama. Kerukunan antar umat beragama serta mengamalkan Pancasila. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Desa Teluk Siantan

No	Jenis agama	Jumlah	Peresentase (%)
1	Islam	1.933 orang	90,87%
2	Khatolik	-	0%
3	Protestan	7 orang	0,32%
4	Hindu	-	0%
5	Budha	187 orang	8,79%
Jumlah		2.127 orang	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Teluk Siantan tahun 2012

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Teluk Siantan mayoritas yaitu 1933 orang (90,87) menganut agama Islam, sedangkan agama Khatolik, Protestan, Hindu dan Budha menjadi agama minoritas yang dianut oleh penduduknya.

4.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan desa penduduk Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah dilihat dari tingkat pendidikan masing-masing dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Tamat SD	150 orang	7.05%
2	Tamat SD	540 orang	25.38%
3	Tamat SMP/SLTP	411 orang	19.32%
4	Tamat SMA/SLTA	715 orang	33.61%
5	Akademi/PT	311 orang	14.62%
Jumlah		2.127 Orang	100%

Sumber: Kantor Desa Teluk Siantan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang paling banyak adalah tamatan SMA atau SLTA berjumlah 715 orang atau 33.61% kemudian disusul dengan penduduk yang tamat SD sebanyak 580 orang atau 25.38% sedangkan yang paling sedikit adalah 150 orang atau 7.05% dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Teluk Siantan.

Masalah pendidikan di Desa Teluk Siantan secara umum tergolong tinggi dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan SMA namun masih terdapat pula yang buta huruf yaitu sebanyak 150 orang (7.05%), hal ini terjadi karena kurangnya kemampun ekonomi.

4.7 Jumlah Sarana Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa teluk Siantan. Pendidikan perlu di tunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jeni Sarana pendidikan	Jumlah	Peresentase (%)
1	TK	1	20%
2	SD	2	40%
3	SLTP	1	20%
4	SLTA	1	20%
JUMLAH		5	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Teluk Siantan, 2012

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sarana pendidikan yang berada di Desa Teluk Siantan sudah cukup memadai walaupun dilihat secara langsung fisik bangunan atau gedung sekolah memang masih ada sarana-sarang pendidikan yang tidak layak digunakan, hal demikian dikarenakan bangunan tersebut sudah sangat lama didirikan dan belum mendapat perhatian khusus pemerintah setempat.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui sarana pendidikan berjumlah 5 pendidikan yang paling banyak adalah sarana pendidikan SD dengan jumlah 2 unit (40%), sedangkan sarana yang lainnya berjumlah 1unit (20%).

Berdasarkan tabel diatas bahwanya untuk sarana pendidikan seperti perguruan tinggi belum ada, bahkan di tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas pun hanya ada 1 perguruan Sehingga menyebabkan banyak anak-anak usia

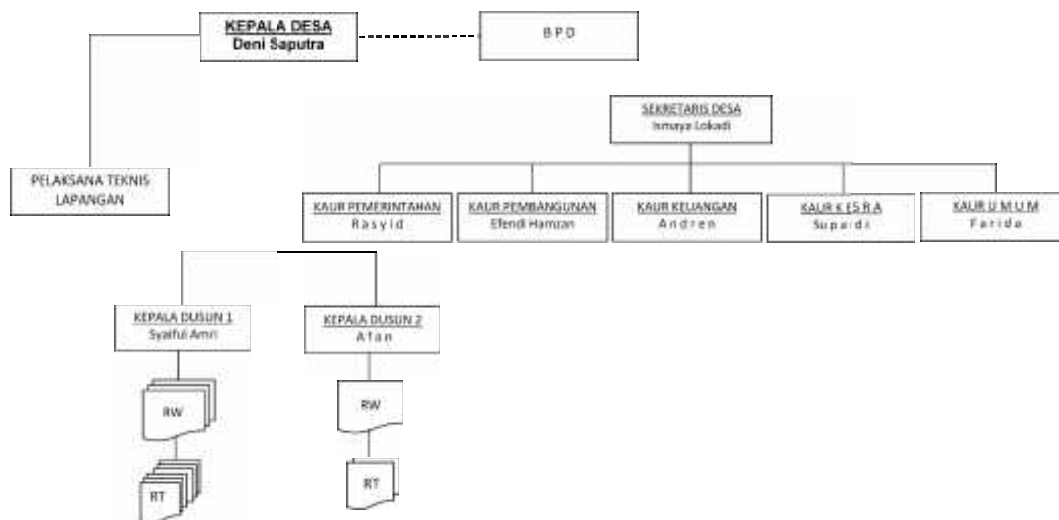
sekolah yang telah menamatkan pendidikan di Sma/ sederajat langsung melanjutkan studinya keluar daerah seperti : Jakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Padang, Pekanbaru, bahkan keluar negeri dan lain-lain.

4.8 Struktur Pemerintahan

Tugas-tugas pemerintah pada umumnya melayani berbagai kepentingan (penduduk) dalam berbagai segi kehidupan mulai dari masalah keamanan dan ketertiban, kesehatan, kependudukan dan sebagainya.

Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 3 dusun, sebagai lembaga sosial milik pemerintah memberi sumbangan yang besar dalam *welfare State* sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945 Bab empat :”.....memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. untuk melihat struktur organisasi Desa Teluk Siantan dapat dilihat dari skema berikut:

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Teluk Siantan



Sumber: kantor Kepala Desa Teluk Siantan Tahun 2012

Untuk menegaskan pola dan tatat pembagian serta hubungan kerja pada unsur-unsur organisasi pemerintah Desa, kedudukan, tugas dan fungsi unit kerja dalam struktur organisasi pemerintahan Desa dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa :**

- a. Kedudukan sebagai alat pemerintah dan unit pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- b. Tugasnya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan pemerintahan, melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat.
- c. Fungsi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga, melaksanakan koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintahan pusat dan

menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah lainnya.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

- a. Berkedudukan sebagai unsur pelayanan atau staf dibidang tata usaha Kepala Desa dan memimpin sekretaris desa.
- b. Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta memberi pelayanan ketatausahaan Kepala Desa.
- c. Fungsinya melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan, melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal bila Kepala Desa berhalangan.

3. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kepala Urusan

- a. Berkedudukan sebagai pembantu bidang tugas masing-masing
- b. Bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing-masing
- c. Berfungsi melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data/informasi yang menyangkut bidang masing-masing.

4. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kepala Dusun:

- a. Berkedudukan sebagai untuk pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- b. Bertugas melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan diwilayah kerjanya.

- c. Berfungsi melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, kemsyarakatan diwilayah kerjanya serta melaksanakan keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Sebelum penelitian ini di jelaskan, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan identitas responden. Responden di sini adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel penelitian. Identitas responden sangat bermanfaat dalam penelitian, guna untuk mengetahui latar belakang responden antara lain mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat umur. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian penulis mengemukakan identitas responden dari:

5.1.1 Jenis Kelamin Responden

Dalam penelitian ini penulis menemukan responden tidak hanya pada satu golongan yaitu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya ada keadilan terhadap responden untuk member tanggapan/informasi kepada penulis

lebih lengkap. Adapun jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 : Jenis kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	23	85.19%
2	Perempuan	4	14.81%
	Jumlah	27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden yang paling banyak adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 (85.19%), dan selebihnya responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 (14.81%). Jadi responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan.

5.1.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden itu sangat mempengaruhi terhadap jawaban responden. Karena pada dasarnya pemahaman dan pengetahuan itu sangat penting, tingkat pendidikan responden itu berbeda-beda antara satu dengan lain. Jika ada yang sama tingkat pendidikanya pun tidak sama daya pemahaman dan pengetahuan. Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2 : Tngkat pendidikan responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	21	77.78%
2	SLTP/SMP	4	14.81%
3	SLTA/SMA	1	3.70%
4	DIPLOMA/SI	1	3.70%
	Jumlah	27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan dimayoritasi tingkat SD sebanyak 21 orang (77,78 %), SLTP sebanyak 4 orang (14.81%) dan tingkat SLTA sebanyak 1 orang (3.70%), serta tengkat Sarjana ada 1 orang (3.70%).

5.1.3 Tingkatan Umur atau Usia

Tingkat umur responden yang dijadikan penelitian itu berbeda-beda. Hal ini berpengaruh kepada tingkat pemahaman terhadap informasi yang penulisdapatkan. Adapun tingkatan umur responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 : Tingkat Umur Responden

No	Tingkatan Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30 Tahun	1	3.70%
2	31-40 Tahun	15	55.56%
3	41-50 Tahun	8	29.63%
4	51-60 tahun	3	11.11%
5	61-70 Tahun	-	-
	Jumlah	27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden pada penlitian ini yang paling banyak adalah responden yang berumur 31-40 Tahun sebanyak 15 orang (55.56). sedangkan tingkat umur paling rendah responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 3.70%. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa memberikan informasi yang lengkap kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

5.2 Pelaksanaan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di desa

Teluk Siantan

Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan yang ditujukan rumah yang sudah tidak layak lagi untuk ditempati karena sudah terlalu banyak kerusakan pada rumah tersebut. Bantuan ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang berpenghasilan Rendah di dalam mewujudkan rumah yang layak huni. Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan bantuan RRTLH di Desa Teluk Siantan di lihat dari kemampuan atau lancarnya dari pelaksa program tersebut, yang di dasarkan pada indikator PERBUB 7b Tahun 2011 tentang prinsip-prinsip pelaksanaanya adalah sebagai berikut:

1. Kesetiakawanan sosial

Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kesetiakawanan sosial pada pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa teluk siantan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4 : Tanggapan Responden Tentang Kepedulian Sosial Terhadap Pelaksanaan Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	14	51.85%
2	Cukup baik	13	48.15%
3	Tidak baik	-	-
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 14 orang (51.85%) menilai baik terhadap kepedulian sosial program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai cukup

baik sebanyak 13 orang (48.15%). Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa kepedulian sosial terhadap yang membutuhkan dikategorikan baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat diketahui bahwa kepedulian sosial terhadap bantuan RRTLH baik dikarenakan kebanyakan responden menilai kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk membangun rumah yang layak huni.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan II (Sekretaris Dinas Sosial kabupaten Kepulauan Anambas) tentang kepedulian sosial, sebagai berikut:

“Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan RRTLH kepada orang yang berpenghasilan rendah, agar bisa membantu dalam memperbaiki rumahnya, untuk itu agar pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya, kita harus bekerjasama baik pemerintah maupun masyarakat”.

Dari jawaban responden dan uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan ini merupakan sikap kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya yang membutuhkan bantuan. Program ini merupakan program yang sangat positif karena langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tabel 5.5 : Tanggapan Responden Tentang di landasi Empati Terhadap Yang Membutuhkan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	15	55.56%
2	Cukup baik	12	44.44%
3	Tidak baik	-	-
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 15 orang (55.56%) menilai baik terhadap di landasi empati kepada orang yang membutuhkan program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai cukup baik sebanyak 12 orang (44.44%). Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa bantuan RRTLH yang dilandasi empati terhadap yang membutuhkan dikategorikan baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat diketahui bahwa bantuan RRTLH yang dilandasi empati terhadap orang yang membutuhkan dalam pelaksanaan program RRTLH baik dikarenakan kebanyakan responden menilai kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah yang ikut juga merasakan bagaimana masyarakat yang hidup dengan rumah yang tidak layak huni yang memerlukan bantuan. Hal ini juga sesuai dengan program Desa yang mana untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Desa.

Menurut pandangan penulis di lapangan, ketidakmampuan masyarakat dalam membangun rumah yang layak huni karena keterbatasan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, jadi hal ini sangat perlu ikut campur pemerintah. Dengan adanya bantuan RRTLH masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 5.6 : Tanggapan Responden Tentang Tolong menolong kepada yang Membutuhkan Dalam Pelaksanaan Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	17	62.96%
2	Cukup baik	10	37.04%
3	Tidak baik	-	-

Jumlah	27	100%
---------------	----	------

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel 5.6 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 17 orang (62.96%) menilai baik terhadap bantuan RRTLH yang dilandasi tolong-menolong dalam pelaksanaan bantuan RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai cukup baik sebanyak 10 orang (37.04%). Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa tolong-menolong terhadap yang membutuhkan dikategorikan baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa bantuan RRTLH yang dilandasi tolong-menolong terhadap yang membutuhkan dalam pelaksanaan program RRTLH baik di karenakan kebanyakan responden menilai kegiatan ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam membangun rumah yang layak huni. Karena untuk membangun rumah yang layak huni membutuhkan dana yang besar, hal itu tidak cukup dengan penghasilan masyarakat yang rendah. Dengan adanya bantuan RRTLH ini sangat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni.

Menurut pengamatan penulis dilapangan, bantuan ini merupakan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam memperhatikan masyarakat yang berpenghasilan rendah, dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan berupa bantuan uang, sedangkan masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga dalam membantu pelaksanaan bantuan RRTTL di Desa Teluk Siantan.

5.7 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kesetiakawanan Sosial

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Kepedulian sosial terhadap yang membutuhkan	14	13	-	27
		92.59%	7.41%	-	100%
2	Empati terhadap yang membutuhkan	15	12	-	27
		88.89%	11.11%	-	100%
3	Tolong menolong terhadap yang membutuhkan	17	10	-	27
		92.59%	7.41%	-	100%
	Total	46	35	-	81
		56.79%	43.21%	-	100%
	Rata-rata	15.33	11.67	-	27
		56.78%	43.22%	-	100%

Sumber: data Olahan Penelitian 2012

Bedasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 46 orang (56.79%), menilai kesetiakawanan sosial dalam pelaksanaan bantuan RRTLH sudah baik. Hal ini di karenakan pelaksanaan bantuan RRTLH telah membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam mewujudkan rumah yang layak huni.

Dalam hal ini masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan RRTLH khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mempunyai rumah yang

sudah tidak layak lagi untuk dihuni. Sehingga program ini sangat dibutuhkan masyarakat agar dapat meningkatkan kehidupannya.

2. Keadilan

Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskrimatif dan seimbang antara hak dan kewajiban. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Keadilan pada pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa teluk siantan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.8 : Tanggapan Responden Tentang Pemerataan Penerima Bantuan Pelaksanaan Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	-	%
2	Cukup Baik	5	18.52%
3	Tidak Baik	22	81.48%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel 5.8 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 22 orang (81.48%) menilai tidak merata bantuan terhadap masyarakat Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai cukup merata sebanyak 5 orang (18.52%). Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa pemerataan penerima bantuan RRTLH terhadap yang membutuhkan dikategorikan tidak baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa bantuan yang diberikan belum merata di desa teluk siantan di karenakan kebanyakan responden menilai masih banyak yang belum mendapatkan bantuan dari 27 orang yang diajukan hanya 7 orang yang mendapatkan bantuan.

Menurut pengamatan penulis di lapangan masih banyak rumah-rumah yang sudah tidak layak huni yang belum mendapatkan bantuan rumah tersebut dalam kondisi yang memperhatikan. hal itu akan menyangkut keselamatan penghuni didalamnya. Jadi kalau dilihat dari kondisinya rumah-rumah tersebut telah layak untuk mendapatkan bantuan.

Tabel 5.9 : Tanggapan Responden Tentang Penerima Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	8	29.63%
2	Cukup baik	15	55.56%
3	Tidak baik	4	14.81%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 15 orang (55.56%) menilai cukup baik terhadap penerima bantuan RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai baik sebanyak 8 orang (29.63%) serta sebanyak 4 orang (14.81%) menilai tidak baik. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa penerima bantuan RRTLH dikategorikan cukup baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat diketahui bahwa penerima bantuan RRTLH cukup baik, responden beralasan bahwa secara keseluruhan penerima cukup berhak menerima bantuan dalam hal ini baik didalam penghasilan, kondisi rumah maupun dalam keikutsertaan penerima dalam pembangunan rumah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan III (Kepala Desa Teluk Siantan) tanggal 9 januari 2013 tentang keadilan, sebagai berikut:

“Bahwa penerima bantuan yang diusulkan telah mendapatkan bantuan, namun belum semua yang mendapatkan bantuan. Penerima yang mendapatkan bantuan telah sesuai dengan yang diusulkan. Sedangkan yang belum mendapatkan bantuan diharapkan bersabar karena bantuan ini akan ada pada tahun yang mendatang”.

Dari jawaban responden dan uraian wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan telah tepat kepada penerima yang membutuhkan, namun tak dapat dungkiri bahwa terdapat salah satu penerima yang mendapatkan bantuan dengan pendapatan yang tetap yaitu seorang guru, bila dibandingkan dengan yang lain yang pendapatan tidak tetap dan lebih kecil maka seorang guru tadi belum berhak mendapatkan bantuan.

Tabel 5.10 : Tanggapan Responden Tentang Penerima telah berhak mendapatkan bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	7	25.93%
2	Cukup baik	12	44.44%
3	Tidak baik	8	29.63%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 12 orang (44.44%) menilai cukup baik penerima menerima bantuan RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai tidak baik sebanyak 8 orang (29.63%) serta sebanyak 7 orang (25.93%) menilai baik. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa penerima telah berhak mendapatkan bantuan RRTLH dikategorikan cukup baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa penerima cukup berhak menerima bantuan RRTLH di Desa Teluk Siantan karena dari ketujuh orang tersebut yang menerima bantuan dilihat dari kondisi rumah sudah berhak mndapatkan bantuan walaupun ada salah satu yang secara penghasilan belum berhak yaitu dengan pendapatan yang tetap. Tetapi kalau dilihat dari keseluruhan yang mendapatkan bantuan RRTLH cukup berhak.

5.11 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Keadilan

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Pemerataan penerima bantuan	-	5	22	27
			18.52%	81.48%	100%
2	Penerima bantuan	8	15	4	27
		29.63%	55.56%	14.81%	100%
3	Penerima telah berhak mendapatkan bantuan	7	12	8	27
		25.93%	44.44%	29.63%	100%
	Total	15	32	34	81
		18.52%	39.51%	41.97%	100%
	Rata-rata	5	10.67	11.33	27
		18.52%	39.52%	41.96%	100%

Sumber: data Olahan Penelitian 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 34 orang (41.97%), menilai keadilan dalam pelaksanaan bantuan RRTLH tidak baik. Hal ini di karenakan pelaksanaan bantuan RRTLH belum merata bantuan yang di berikan kepada masyarakat Desa Teluk Siantan. Jika diperhatikan kondisi rumah dan penghasilan yang didapatkan maka masyarakat yang mengajukan nama-nama tersebut sangat perlu untuk diberikan bantuan.

Untuk itu, agar bantuan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang khususnya berpenghasilan rendah dan mempunyai rumah yang sudah tidak layak

lagi untuk dihuni pemerintah harus benar-benar memperhatikan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

3. Kemanfaatan

Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ ruang/ kondisi yang diperbaiki atau diganti. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kemanfaatan pada pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Teluk Siantan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.12 : Tanggapan Responden Tentang Manfaat Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	24	88.89%
2	Cukup baik	3	11.11%
3	Tidak baik	-	-
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua responden sebanyak 24 orang (88.89%) menilai baik terhadap manfaat program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun sebanyak 3 orang (11.11%) menilai cukup baik. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa manfaat bantuan RRTLH terhadap yang membutuhkan dikategorikan baik.

Dapat di ketahui bahwa manfaat program RRTLH baik di karenakan kebanyakan responden menilai bahwa manfaat bantuan ini sangat besar terhadap

yang membutuhkan. Bantuan ini menjadi awal untuk masyarakat menciptakan rumah yang layak huni.

Menurut pengamatan penulis dilapangan bahwa rumah yang mereka tempati sudah tidak layak lagi untuk di huni, karena menyangkut keselamatan apalagi dalam cuaca yang buruk. Jadi jika rumah tersebut mendapatkan bantuan bukan hanya angka kemiskinan yang berkurang tetapi juga menghindari resiko kecelakaan.

Tabel 5.13 : Tanggapan Responden Tentang Perbaikan Rumah Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	23	85.19%
2	Cukup baik	4	14.81%
3	Tidak baik	-	-
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 23 orang (85.19%) menilai baik terhadap perbaikan rumah dalam program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai cukup baik sebanyak 4 orang (14.81%). Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa perbaikan rumah terhadap yang membutuhkan dikategorikan baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa perbaikan rumah terhadap program RRTLH baik di karenakan kebanyakan responden menilai kegiatan ini memperbaiki rumah yang sudah tidak layak lagi untuk di huni lagi walaupun bantuan tersebut belum cukup memperbaiki secara keseluruhan rumah yang akan diperbaiki namun bantuan tersebut menjadi semangat bagi

masyarakat untuk membangun rumah, sehingga untuk mencukupi dalam memperbaiki rumah tersebut warga menyediakan seperti kayu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan III (Kepala Desa Teluk Siantan) tanggal 9 Januari 2013 tentang perbaikan rumah yang mendapatkan bantu, sebagai berikut:

“Untuk membangun rumah diperlukan dana sekitar Rp40.000.000-50.000.000. sedangkan dana yang didapat sebesar Rp20.000.000. untuk selebihnya penerima bantuan lah yang menambahkan”.

Dari jawaban responden dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perbaikan rumah dengan mendapatkan bantuan RRTLH telah cukup, jika yrumanya hanya diperbaiki saja. Namun jika ingin membangun rumah yang baru masyarakat harus menambah kekurangan atas dana yang diberikan.

Tabel 5.14 : Tanggapan Responden Tentang meningkatnya kesejahteraan masyarakat terhadap Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	8	29.63%
2	Cukup baik	19	70.37%
3	Tidak baik	-	-
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 19 orang (70.37%) menilai cukup baik terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap yang mendapatkan bantuan RRTLH di Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai baik sebanyak 8 orang (29.63%). Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa meningkatnya kesejahteraan terhadap yang membutuhkan dikategorikan cukup baik.

Dari tanggapan responden tersebut member alasan bahwa dapat diketahui bahwa bantuan tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena bantuan RRTLH yang diberikan memperbaiki rumah yang sudah tidak layak lagi dihuni.

Dalam hal ini jika tempat tinggal masyarakat sudah layak huni akan meningkatkan kesejahtraanya terutama dalam hal kesehatan. Karena rumah yang tidak layak untuk dihuni akan memudahkan penghuninya terkena penyakit.

5.15: Rekapitulasi Tanggapan Responden kemanfaatan Program RRTLH

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Berguna bantuan bagi masyarakat	24	3		
		88.89%	11.11%	-	
2	Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan dan fungsi dari barang atau ruang kondisi yang diperbaiki	23	4	-	
		85.19%	14.81%	-	
3	Berguna bagi kesejahteraan	8	19	-	
		70.37%	29.63%	-	
	Total	55	26	-	81
		67.90%	32.10%	-	100%
	Rata-rata	18.33	8.67	-	27
		67.89%	32.11%	-	100%

Sumber: data Olahan Penelitian, 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 55 orang (67.90%) menilai kemanfaatan dalam pelaksanaan bantuan RRTLH sudah baik. Hal ini dikarenakan pelaksanaan bantuan RRTLH telah memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat Desa Teluk Siantan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penerima bantuan (Lukman) tanggal 9 Januari 2013 tentang manfaat program RRTLH, sebagai berikut:

”bahwa jika tidak ada bantuan ini maka untuk membangun rumah yang layak untuk di huni sangat sulit dengan keterbatasan penghasilan. Jadi bantuan RRTLH ini sangat bermanfaat besar terhadap kami yang membutuhkan, karena masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak mampu untuk membangun rumah yang layak huni penghasilan yang didapatkan hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja”.

Dari uraian wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa bantuan RRTLH sangat bermanfaat terutama bagi yang membutuhkan. Masyarakat yang kurang mampu akan sangat terbantu dengan bantuan RRTLH ini. Karena bantuan RRTLH ini akan menjadi starter bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

4. Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai keterpaduan pada pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa Teluk Siantan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.16 : Tanggapan Responden Tentang Peran Aktif Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	3	11.11%
2	Cukup baik	17	62.96%
3	Tidak baik	7	25.93%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 17 orang (62.96%) menilai cukup baik terhadap kepedulian sosial program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai tidak baik sebanyak 7 orang (25.93%) serta baik sebanyak 3 orang (11.11%). Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa peran aktif pemerintah dikategorikan cukup baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa peran aktif pemerintah terhadap program RRTLH cukup baik di karenakan kebanyakan responden menilai bahwa pemerintah dalam hal ini yang berperan hanya pemerintah Desa.

Menurut pengamatan penulis dilapangan bahwa pemerintah Desa sangat besar peranya di dalam pelaksanaan bantuan RRTLH Kepala Desa sendiri beserta Kaur-kaur Desa yang berperan sebagai tukang di beberapa rumah penerima bantuan di tambah dengan masyarakat dan penerima bantuan. Jadi dalam hal ini peran Pemerintah yang di maksud hanya Pemerintah Desa.

Tabel 5.17 : Tanggapan Responden Tentang Peran Aktif Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	8	29.63%
2	Cukup baik	15	55.56%
3	Tidak baik	4	14.81%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 15 orang (55.56%) menilai cukup baik terhadap peran aktif masyarakat terhadap program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai baik sebanyak 8 orang (29.63%) serta tidak baik sebanyak 4 orang (14.81%). Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa peran aktif masyarakat dikategorikan cukup baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa peran aktif masyarakat terhadap program RRTLH cukup baik di karenakan kebanyakan responden menilai bahwa masyarakat cukup baik dalam membantu penerima bantuan membangun rumah.

Dalam hal ini masyarakat sangat berperan dalam membangun rumah penerima bantuan, seperti menegakan tiang, mengangkat kayu. Untuk itu peran dari masyarakat dalam pelaksanaan bantuan cukup baik.

Tabel 5.18 : Tanggapan Responden Tentang Peran Aktif Penerima bantuan Terhadap Pelaksanaan Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	15	55.56%
2	Cukup baik	9	33.33%
3	Tidak baik	3	11.11%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 15 orang (55.56%) menilai baik peran aktif penerima bantuan terhadap program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai cukup baik sebanyak 9 orang (33.33%) serta tidak baik sebanyak 3 orang

(11.11%). Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa peran aktif penerima bantuan dikategorikan baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa peran aktif penerima bantuan terhadap pelaksanaan RRTLH baik di karenakan kebanyakan responden menilai bahwa penerima bantuan sangat berperan dalam membangun rumahnya.

Menurut pengamatan penulis dilapangan, Hal ini bisa dilihat dari rumah yang diperbaiki melebihi bantuan yang diberikan. Jadi untuk membangun rumah yang layak huni sebagian besar penerima menambahkan dana yang diberikan kepadanya.

5.2.19 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Keterpaduan Program RRTLH

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Peran aktif pemerintah	3	17	7	27
		11.11%	62.96%	25.93%	100%
2	Peran aktif masyarakat	8	15	4	27
		29.63%	55.56%	14.81%	100%
3	Peran aktif penerima bantuan	15	9	3	27
		55.56%	33.33%	11.11%	100%
	Total	26	41	14	81
		32.10%	50.62%	17.28%	100%
	Rata-rata	8.67	13.66	4.67	27
		32.11%	50.59%	17.30	100%

Sumber: data Olahan Penelitian, 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 41 orang (50.62%) menilai keterpaduan dalam pelaksanaan bantuan RRTLH cukup baik.

Hal ini di karenakan pelaksanaan bantuan RRTLH antara Pemerintah Desa, masyarakat dan penerima bantuan bekerja sama dalam hal pelaksanaan bantuan RRTLH. Hal ini bisa terlihat dengan berperanya Kepala Desa sebagai tukang serta Kaur Desa dalam membangun rumah yang dibantu juga masyarakat yang secara bersama-sama melaksanakan bantuan RLTLHdi Desa Teluk Siantan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Dinas Sosial selaku pelaksana di dalam bantuan RRTLH di Desa Teluk Siantan kurang berperan, hal ini terlihat jelas bahwa tugas dari Dinas Sosial selaku pengawas dalam pelaksanaan RRTLH tidak di jalani. Hal ini terlihat dengan belum pernahnya meninjau pembangunan langsung yang dilaksanakan di Desa Teluk Siantan.

5. Keberpihakan kepada orang miskin

Mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai keberpihakan kepada orang miskin pada pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa teluk siantan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.20 : Tanggapan Responden Tentang Tepat Pada Orang Yang Membutuhkan Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	8	29.63%
2	Cukup baik	7	25.93%
3	Tidak baik	12	44.44%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 12 orang (44.44%) menilai bantuan yang di berikan tidak tepat pada orang yang membutuhkan dalam pelaksanaan program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai tepat sebanyak 8 orang (29.63%) serta cukup tepat sebanyak 7 orang (25.93%). Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa tepat pada orang yang membuthkan dikategorikan tidak baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa bantuan yang di berikan tidak tepat kepada yang membutuhkan dalam pelaksanaan program RRTLH di karenakan kebanyakan responden menilai masih banyak orang lain yang membutuhkan yang seharusnya mendapatkan bantuan.

Menurut pengamatan penulis dilapangan bahwa terdapat penerima bantuan yang mempunyai pendapatan tetap yaitu dengan status Guru tidak tetap (GTT) yang merupakan honor daerah. Jika di lihat dari segi kondisi rumah penerima berhak mendapatkan bantuan namun dari segi pendapatan masih banyak masyarakat yang berpenghasilan yang tidak tetap dan rendah yang tidak mendapatkan bantuan.

Tabel 5.21 : Tanggapan Responden Tentang Manfaat Pada Orang Yang Membutuhkan Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	18	66.67%
2	Cukup baik	7	25.93%
3	Tidak baik	2	7.41%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 18 orang (66.67%) menilai bantuan yang di berikan bermanfaat pada orang yang membutuhkan dalam pelaksanaan program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai cukup baik sebanyak 7 orang (25.93%) serta 2 orang (7.41%) menyatakan tidak bermanfaat. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa bermanfaat pada orang yang membutuhkan dikategorikan baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa bantuan yang di berikan sangat bermanfaat kepada yang membutuhkan dalam pelaksanaan program RRTLH di karenakan kebanyakan responden menilai bantuan yang di berikan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 5.22 : Tanggapan Responden Tentang Hasil Pada Orang Yang Membutuhkan Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	5	29.63%
2	Cukup baik	10	25.93%
3	Tidak baik	12	44.44%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 12 orang (44.44%) menilai tidak baik hasilnya pada orang yang membutuhkan dalam pelaksanaan program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai cukup baik sebanyak 10 orang (37.04%) serta sebanyak 5 orang (18.52%) menyatakan baik. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa tepat pada orang yang membuthkan dikategorikan cukup baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa bantuan yang di berikan hasilnya tidak baik di Desa Teluk Siantan karena masyarakat menilai bahwa masih banyak masyarakat yang memerlukan bantuan tetapi belum dapat, padahal nama-nama tersebut telah di ajukan, timbul rasa kekecewaan terhadap masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan III (Kepala Desa Teluk Siantan) tanggal 9 januari 2013 tentang keadilan, sebagai berikut:

“Saya kira bahwa bantuan ini didapatkan oleh semua yang diajukan seblumnya tidak ada penjelasan kepada masyarakat tentang rumah-rumah yang diajukan akan di seleksi terlebih dahulu”.

Dari jawaban responden dan uraian wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelumnya tidak ada penjelasan dari pihak Desa. Sehingga masyarakat yang diajukan namanya hanya mendapatkan informasi bahwa nama-nama yang telah diajukan akan mendapatkan bantuan. Sehingga timbulaah kekecewaan dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan RRTLH.

5.23 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang keberpihakan kepada orang miskin

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Di berikan kepada yang membuthkan	8	7	12	27
		29.63%	25.93%	44.44%	100%
2	Bermanfaat kepada orang yang membutuhkan	18	7	2	27
		66.67%	25.93%	7.41%	100%
3	Memberikan hasil kepada orang yang membutuhkan	5	10	12	27
		29.63%	25.93%	44.44%	100%
	Total	31	24	26	81
		38.27%	29.63%	32.10%	100%

	Rata-rata	10.33	8	8.67	27
		38.27%	29.62%	32.11%	100%

Sumber: data Olahan Penelitian 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 31 orang (38.27%), menilai keberpihakan kepada orang miskin dalam pelaksanaan bantuan RRTLH sudah baik.

Hal ini di karenakan pelaksanaan bantuan RRTLH telah memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk membangun rumah yang layak huni. Sehingga dengan adanya bantuan tersebut masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki rumah yang sudah layak untuk dihuni.

Masyarakat menilai bantuan RRTLH ini merupakan Bantuan langsung yang dapat dirasakan masyarakat, sehingga hal ini dirasakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, namun terkadang didalam pelaksanaanya bantuan yang khusus diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan yang mempunyai rumah yang sudah tidak layak lagi untuk dihuni tidak dapat merasakan bantuan tersebut, karena ada masyarakat yang berpenghasilan lebih mampu lagi yang mendapatkan bantuan.

6. Transparansi

Bahwa kegiatan Program Rehabilitasi rumah layak huni ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksaaan pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat khususnya sasaran penerima program. Untuk mengetahui tanggapan

responden mengenai Transparansi pada pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa teluk siantan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.24 : Tanggapan Responden Tentang Keterbukaan Di Saat Survei

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	-	-
2	Cukup baik	25	92.59%
3	Tidak baik	2	7.41%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 25 orang (92.59%) menilai cukup baik terhadap keterbukaan di saat survei dalam pelaksanaan program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai tidak baik sebanyak 2 orang (7.41%). Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa keterbukaan disaat survei dikategorikan cukup baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa cukup baik petugas di dalam melakukan survei di Desa Teluk Siantan karena petugas yang terdiri dari pegawai Desa langsung turun lapangan di dalam melakukan survei terhadap rumah-rumah yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan.

Walaupun hal ini tidak dimusyawarahkan tetapi Aparatur Desa langsung meninjau kerumah-rumah yang akan di usulkan.

Tabel 5.25 : Tanggapan Responden Tentang Keterbukaan Besaran Bantuan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	12	44.44%
2	Cukup baik	15	56.56%
3	Tidak baik	-	-
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 15 orang (56.56%) menilai cukup baik Keterbukaan besaran bantuan dalam pelaksanaan program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai baik sebanyak 12 orang (44.44%). Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa keterbukaan besaran dikategorikan cukup baik.

. Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa keterbukaan besaran baantuan yang diterima cukup jelas, walaupun sebelum mendapatkan bantuan belum ada kejelasan besaran bantuan yang akan diberikan. Namun setelah dicairkan hal itu langsung di Umumkan oleh Wakil Bupati Kepulauan Anambas.

Tabel 5.26 : Tanggapan Responden Tentang Keterbukaan Dalam Pembangunan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	9	33.33%
2	Cukup baik	16	59.26%
3	Tidak baik	5	18.52%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 16 orang (59.26%) menilai cukup baik keterbukaan dalam pembangunan dalam pelaksanaan program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai baik sebanyak 9 orang (33.33%) serta sebanyak 5 orang (18.52%) menyatakan tidak baik .

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa keterbukaan dalam pembangunan terhadap pelaksanaan bantuan RRTLH di Desa Teluk

Siantan cukup baik karena masyarakat ikut serta membangun rumah yang mendapatkan bantuan.

berdasarkan hasil wawancara dengan informan III (Kepala Desa Teluk Siantan) tanggal 9 Januari 2013 tentang keterbukaan dalam pembangunan, sebagai berikut:

“Dalam hal ini masyarakat juga ikut membantu seperti ikut menegakan tiang, mengangkat bahan, sangat banyak yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan RRTLH”

Dari jawaban responden dan uraian wawancara diatas bahwa Kepala Desa selaku petugas pelaksana juga terus memantau pelaksanaan pembangunan di karenakan berperanya Kepala Desa menjadi tukang. Sehingga Kepala Desa mengetahui jelas pelaksanaan pembangunan RRTLH di Desa Teluk Siantan.

5.27 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Transparansi

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Transparansi saat survey	-	25	2	27
			92.59%	7.41%	100%
2	Transparansi saat bantuan diberikan	12	15	-	27
		44.44%	56.56%		100%
3	Transparansi saat pelaksanaan pembangunan	9	16	2	27
		33.33%	59.26%	18.52%	100%
	Total	21	56	4	81
		25.93%	69.13%	4.94%	100%
	Rata-rata	7	18.67	1.33	27
		25.93%	69.15%	4.92%	100%

Sumber: data Olahan Penelitian, 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 56 orang dengan persentase 69.13%, menilai transparansi dalam pelaksanaan bantuan RRTLH cukup baik.

Karena kebanyakan responden menilai bahwa dalam pelaksanaan bantuan RRTLH cukup transparan baik itu dalam survei, besaran bantuan maupun pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Teluk Siantan sudah cukup baik karena Pemerintah Desa serta masyarakat ikut serta dalam pembangunan rumah yang mendapatkan bantuan. Jadi Kepala Desa yang langsung melihat pembangunan rumah yang mendapatkan bantuan tersebut.

Namun dalam hal ini terkadang masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai waktu pencairan, karena terkadang informasi yang diberikan tidak memberikan jawaban yang pasti. Dan bahkan untuk masyarakat harus mengulang-ulang untuk bertanya kapan waktu pencairan bantuan RRTLH ini.

7. Partisipasi

Masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Partisipasi pada pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa teluk siantan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.28 : Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Masyarakat dalam Sosialisasi

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	5	18.52%
2	Cukup baik	14	51.85%
3	Tidak baik	8	29.63%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 14 orang (51.85%) menilai cukup baik terhadap keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi terhadap pelaksanaan program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai tidak baik sebanyak 8 orang (29.63%) serta sebanyak 5 orang (18.52%) menilai baik. Dalam hal ini dapat dinyatakan keikutsertaan masyarakat saat sosialisasi dikategorikan cukup baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi cukup baik. Hal ini terlihat ketika petugas datang kerumah calon penerima bantuan mereka memberikan informasi yang dibutuhkan.

Tabel 5.29 : Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pembangunan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	9	33.33%
2	Cukup baik	13	48.15%
3	Tidak baik	5	18.52%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 13 orang (48.15 %) menilai cukup baik terhadap keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi terhadap pelaksanaan program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun

masih ada tanggapan masyarakat yang menilai baik sebanyak 9 orang (33.33%) serta sebanyak 5 orang (18.52%) menilai tidak baik. Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan cukup baik dalam pelaksanaan program RRTLH di Desa Teluk Siantan.

Menurut pengamatan penulis dilapangan hal ini terbukti bahwa masyarakat ikut juga dalam proses pembangunan rumah yang mendapatkan bantuan. Masyarakat juga saling tolong menolong di dalam membangun rumah yang mendapatkkan bantuan seperti menegakan tiang, mengangkat bahan dan juga ikut dalam pengecatan.

Tabel 5.30 : Tanggapan Responden Tentang Pengawasan masyarakat dalam Pelaksanaan Bantuan RRTLH

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	8	29.63%
2	Cukup baik	13	48.19%
3	Tidak baik	6	22.22%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 13 orang (48.15%) menilai cukup baik terhadap pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan program RRTLH di Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai baik sebanyak 8 orang (29.63%) serta sebanyak 6 orang (18.52%) menilai tidak baik. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa pengawasan masyarakat dikategorikan cukup baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan bantuan RRTLH cukup baik. Karena masyarakat

ikut serta baik dalam proses sosialisasi maupun dalam proses pembangunan jadi di dalam pelaksanaan bantuan RRTLH masyarakat ikut dari awal proses sampai terakhir proses pembangunan rumah layak huni.

Namun tidak dapat dipungkiri masih ada juha masyarakat yang tidak ikut sekali dalam pelaksanaan bantuan RRTLH dikarenakan Kesibukan yang tidak bias ditinggalkan.

5.31 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Partisipasi

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Berperan dalam perencanaan	5	14	8	27
		18.52%	51.85%	29.63%	100%
2	Berperan dalam pelaksanaan	9	13	5	27
		33.33%	48.15%	18.52%	100%
3	Berperan dalam pengawasan	8	13	6	27
		29.63%	48.15%	22.22%	100%
	Total	22	40	19	81
		27.16%	49.38%	23.46%	100%
	Rata-rata	10	10.33	6.67	27
		37.04%	38.26%	24.70%	100%

Sumber: data Olahan Penelitian 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 40 orang dengan persentase 49.38%, menilai partisipasi dalam pelaksanaan bantuan RRTLH cukup baik.

Hal ini di karenakan Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan bantuan RRTLH di desa Teluk Siantan hal ini sangat membantu baik bagi pemerintah maupun bagi penerima bantuan dalam menyukseskan Program bantuan RRTLH. Dalam hal ini kepala Desa juga mengatakan bahwa banyak yang telah dilakukan

oleh masyarakat khususnya dalam pembangunan rumah seperti menegakan tiang mengangkat kayu. Jadi partisipasi masyarakat cukup baik dalam pelaksanaan bantuan RRTLH di desa Teluk Siantan.

Namun terkadang masih juga masyarakat yang kurang peduli terhadap pelaksanaan bantuan RRTLh, hal itu karena masyarakat mempunyai kesibukan tersendiri. Tetapi secara keseluruhan peran masyarakat didalam pelaksanaan bantuan RRTLH ini sudah cukup baik.

8. Desentralisasi

Masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa itervensi negative dari luar. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai desentralisasi pada pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa teluk siantan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.32 : Tanggapan Responden Tentang Tanggungjawab Masyarakat Dalam Pelaksanaan Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	15	55.56%
2	Cukup baik	5	18.52%
3	Tidak baik	7	25.93%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 15 orang dengan (55.56%) menilai tentang tanggungjawab masyarakat dalam pelaksanaan program RRTLH Desa Teluk Siantan telah baik. Namun masih ada

tanggapan masyarakat yang menilai tidak baik sebanyak 7 orang (25.93%) serta sebanyak 5 orang (18.52%) menilai cukup baik. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan dikategorikan cukup baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat diketahui bahwa tanggungjawab masyarakat dalam pelaksanaan bantuan RRTLH di nilai baik. Karena masyarakat telah ikut serta dalam berbagai hal pelaksanaan bantuan RRTLH.

Menurut pengamatan peneliti lapangan masyarakat sangat berperan dalam pelaksanaan RRTLH, baik dalam pembangunan maupun dalam pengawasan.

Tabel 5.33 : Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Mengelola Pembangunan Secara Mandiri

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	5	18.52%
2	Cukup baik	6	22.22%
3	Tidak baik	16	59.26%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 16 orang (59.26%) menilai tidak baik masyarakat mengelola pembangunan secara mandiri dalam pelaksanaan program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai cukup baik sebanyak 6 orang (22.22%) serta sebanyak 5 orang (18.52%) menilai baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat mengelola pembangunan secara mandiri dalam pelaksanaan program RRTLH tidak baik dikarenakan kebanyakan responden menilai kegiatan ini harus ada ikut campur dari pemerintah, apalagi dalam hal ini Program RRTLH merupakan

program bedah rumah yang pertama kali ada di Desa Teluk Siantan, masyarakat butuh bantuan dalam pelaksanaanya baik itu tentang bentuk rumah yang di bangun maupun bentuk administrasi dalam laporan pembangunan, harus ada kerja sama antara penerima bantuan, masyarakat maupun pemerintah dalam pelaksanaan bantuan RRTLH.

Tabel 5.34 : Tanggapan Responden Masyarakat Mengelola pembangunan Tanpa Intervensi dari Pihak Luar

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	19	70.37%
2	Cukup baik	7	25.93%
3	Tidak baik	1	3.70%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 19 orang (70.37%) menilai baik masyarakat mengelola pembangunan tanpa intervensi dari luar dalam pelaksanaan program RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai cukup baik sebanyak 7 orang dengan (25.93%) serta sebanyak 1 orang (3.70%) menilai tidak baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa masyarakat mengelola pembangunan tanpa intervensi dari pihak luar maksud dari pihak luar disini adalah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang hanya merugikan baik bagi penerima bantuan maupun dari pemerintah, hal ini juga di katakana oleh Kepala Desa bahwa tidak ada pihak luar yang ikut campur dalam pelaksanaan RRTLH.

5.35 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Desentralisasi

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Masyarakat memiliki kewenangan untuk mengelola pembangunan	15	5	7	27
		55.56%	18.52%	25.93%	100%
2	Masyarakat bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri	5	6	16	27
		18.52%	22.22%	59.26%	100%
3	Masyarakat berwenang melaksanakan pembangunan tanpa intervensi dari pihak luar	19	7	1	27
		70.37%	25.93%	3.70%	100%
	Total	39	18	24	81
		48.15%	22.22%	29.63%	100%
	Rata-rata				

Sumber: data Olahan Penelitian, 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 39 orang (48.15%), menilai desentralisasi dalam pelaksanaan bantuan RRTLH sudah baik.

Hal ini di karenakan masyarakat telah ikut serta dalam pelaksanaan Bantuan RRTLH di Desa Teluk Siantan dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa masyarakat Desa Teluk Siantan merupakan masyarakat yang masih punya kebiasaan bergotong royong dalam melakukan pekerjaan. Jadi di dalam pelaksanaan bantuan RRTLH di Desa Teluk Siantan masyarakat sangat memberikan bantuanya dalam kelancaran pembangunan tersebut.

Untuk itu peran masyarakat dalam pelaksanaan bantuan RRTLH ini sangat berpengaruh. Hal itu bisa terlihat dengan ikutnya masyarakat dalam berbagai macam kegiatan dalam pelaksanaan bantuan RRTLH ini.

9. Akuntabilitas

Setiap pengelolaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Akuntabilitas pada pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Teluk siantan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.36 : Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Pembabangunan Rumah

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	2	7.41%
2	Cukup baik	3	11.11%
3	Tidak baik	22	81.48%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 22 orang (81.48%) menilai tidak baik terhadap pengawasan dalam pelaksanaan bantuan RRTLH di Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai cukup baik sebanyak 3 orang (11.11%) serta sebanyak 2 orang (7.41%) menilai baik.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa pengawasan dalam pelaksanaan bantuan RRTLH tidak baik di karenakan kebanyakan

responden menilai kegiatan ini tidak ada pengawasan baik dari Pemerintah Kabupaten yaitu Dinas Sosial atau kecamatan selaku tim pelaksana.

Tabel 5.37: Tanggapan Responden Tentang Tanggung Jawab Pihak-Pihak Terkait Pelaksanaan Bantuan RRTLH Di Desa Teluk Siantan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	-	-
2	Cukup baik	4	14.81%
3	Tidak baik	23	85.19%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 23 orang (85.19%) menilai tidak baik terhadap tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan bantuan RRTLH Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai cukup baik sebanyak 4 orang (14.81%)

. Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui bahwa tanggungjawab pihak-pihak terkait terhadap pelaksanaan bantuan RRTLH tidak baik di karenakan kebanyakan responden menilai pihak-pihak dalam pelaksanaan bantuan RRTLH seperti Dinas Sosial dan Kecamatan Siantan Tengah selaku pelaksana belum pernah melakukan peninjauan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan III (Kepala Desa Teluk Siantan) tanggal 9 januari 2013 tentang tanggung jawab pihak terkait, sebagai berikut:

“Bahwa tidak ada peninjauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial langsung yang turun kelapangan untuk melihat kondisi atau keadaan rumah yang memerlukan bantuan pengawasan di lakukan hanya oleh saya.

Dari jawaban responden dan uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial dan kecamamtan memang belum ada melakukan peninjauan terhadap rumah-rumah yang akan mendapatkan bantuan, padahal hal ini sangat diperlukan.

Tabel 5.38 : Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan RRTLH Telah Sesuai Dengan Perbub

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sesuai	7	25.93%
2	Cukup Sesuai	9	33.33%
3	Tidak Sesuai	11	40.74%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden sebanyak 11 orang (40.74%) menilai tidak sesuai terhadap pelaksanaan bantuan RRTLH dengan PERBUB di Desa Teluk Siantan. Namun masih ada tanggapan masyarakat yang menilai cukup sesuai sebanyak 9 orang dengan (33.33%) serta sebanyak 7 orang (25.93%) menyatakan sesuai.

Dari tanggapan responden tersebut dapat di ketahui pelaksanaan bantuan RRTLH tidak sesuai dengan PERBUB. di karenakan kebanyakan responden menilai bantuan yang di berikan belum sesuai dengan PERBUB hal ini bisa terlihat belum adanya pembentukan kelompok penerima bantuan yang mana tugas dari kelompok ini adalah mengusulkan nama-nama yang akan mendapatkan bantuan serta membuka rekening untuk pencairan.

Dari pengamatan peneliti dilapangan bahwa tugas kelompok tersebut diambil alih oleh Kepala Desa Teluk Siantan. Sehingga Kepala Desa mengusulkan

nama-nama dalam pengajuan untuk mendapatkan bantuan RRTLH serta pencairan dana bantuan.

5.39 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Dapat dipertanggungjawabkan setempat	2	3	22	27
		7.41%	11.11%	81.48%	100%
2	Dapat dipertanggungjawabkan terhadap pihak yang terkait	-	4	23	27
		-	14.81%	85.19%	100%
3	Dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Undang-undang	7	9	11	27
		25.93%	33.33%	40.47%	100%
	Total	9	16	56	81
		11.11%	19.75%	69.14%	100%
	Rata-rata	3	5.33	18.67	27
		11.11%	19.74%	69.15%	100%

Sumber: data Olahan Penelitian, 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 56 orang dengan persentase 69.14%, menilai akuntabilitas dalam pelaksanaan bantuan RRTLH tidak baik.

Hal ini di karenakan pelaksanaaan bantuan RRTLH di desa Teluk Siantan Kurangnya Pengawasan dari pihak-pihak terkait, dan juga belum adanya pembentukan kelompok-kelompok penerima bantuan RRTLH. Dari hasil ovservasi peneliti di lapangan bahwa semua tugas seperti pengawasan, pengajuan nama-nama penerima bantuan, penyaluran bantuan, serta laporan kegiatan semua

di lakukan oleh Kepala Desa. Jadi dalam hal ini Kepala Desa beserta Stafnya merangkap semua pekerjaan dalam pelaksanaan RRTLH di Desa Teluk Siantan.

Dalam hal ini seharusnya penerima harus membentuk kelompok, agar pelaksanaan RRTLh lebih transparan lagi, dan juga mengurangi tugas dari Kepala Desa yang begiitu banyaknya.

5.3 Rekapitulasi Data.

Dari beberapa uraian tabel sebelumnya mengenai tanggapan responden terhadap pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.40 : Rekapitulasi jawaban Responden Tentang Pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Teluk Siantan

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Kesetiakawanan sosial	46	35	-	81
		56.79%	43.21%	-	100%
2	Keadilan	15	32	34	81
		18.52%	39.51%	41.97%	100%
3	Kemanfaatan	55	26	-	81
		67.90%	32.10%	-	100%
4	Keterpaduan	26	41	14	81
		32.10%	50.62%	17.28%	100%
5	Keberpihakan kepada orang miskin	31	24	26	81
		38.27%	29.63%	32.10%	100%
6	Transparansi	21	56	4	81
		25.93%	69.13%	4.94%	100%
7	Partisipatif	22	40	19	81
		27.16%	49.38%	23.46%	100%
8	Desentralisasi	39	18	24	81
		48.15%	22.22%	29.63%	100%
9	Akuntabilitas	9	16	56	81
		11.11%	19.75%	69.14%	100%
	Jumlah	264	288	177	729

		36.21%	39.51%	24.26%	100%
	Total	9.78	10.67	6.55	27
		36.22%	39.52%	24.26%	100%

Sumber: Data olahan penelitian, 2012

Berdasarkan tabel di atas merupakan rekapitulasi tanggapan mengenai pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, bahwa pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik. Hal ini terbukti dengan kebanyakan responden menilai baik sebanyak 264 orang (36.21%), Cukup baik sebanyak 288 orang (39.51%). dan yang menilai tidak baik adalah 177 orang dengan persentase 24.26%

Dari hasil penelitian tersebut ternyata Analisis Pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011 berjalan sudah “cukup baik” yakni sebanyak 288 orang responden (39.51%) yang memberikan tanggapannya dari 27 orang jumlah responden masyarakat secara keseluruhan.

5.4 Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011 Di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas

Dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan tidak ada stupun yang berjalan dengan lancar dan mulus meskipun sudah mencapai target ataupun sasarnya. Akan tetapi besar atau kecinya, banyak atau sedikit pasti mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan dengan adanya hambatan-hambatan tersebut maka akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang baru dalam hal pembangunan pemberdayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pelaksanaan bantuan RRTLH di Desa Teluk Siantan pada tahun 2011 masih

mengalami kendala-kendala dalam proses pencapaian pemerataan yang maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis akan menjelaskan secara umum berbagai kendala-kendala yang ada ataupun yang pernah terjadi dalam proses pelaksanaan bantuan RRTLH tersebut yakni:

1. Kurang maksimalnya pelaksanaan musyawarah Desa (Musdes) yang merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi. Dalam hal ini aparat desa harus mampu untuk lebih memaksimalkan lagi supaya pihak yang terlibat seperti masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara maksimal. Sehingga pelaksanaan bantuan ini lebih transparan.
2. Tidak adanya pembentukan Kelompok penerima bantuan karena tugas dari kelompok ini sangatlah penting. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut Kepala Desa yang melakukan pekerjaan tersebut.
3. Kurangnya maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab seperti Dinas Sosial dalam pembangunan rumah, sehingga terdapat rumah yang telah mendapatkan bantuan namun belum ada perbaikan yang seperti diharapkan.
4. Kurang selektifnya Dinas Sosial menetapkan penerima bantuan RRTLH sehingga ada penerima dengan pendapatan yang tetap dan lebih tinggi mendapatkan bantuan RRTLH.
5. Pada kegiatan sarana prasarana masih juga terdapat kendala seperti susah untuk mendapatkan bahan utama dalam pembangunan, seperti kayu. Dan juga akibat langkanya bahan utama maka untuk mendapatkannya harus membayar dengan harga yang sangat tinggi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011 di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian Analisis pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tahun 2011 dengan menggunakan indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Bantuan RRTLH, dapat dilihat dari hasil rekapitulasi pada tabel 5.40 tanggapan responden menilai baik sebanyak 264 orang dengan persentase 36.21%, Cukup baik sebanyak 288 dengan persentase 39.51% dan yang menilai tidak baik adalah 177 orang dengan persentase 24.26%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan RRTLH di Desa Teluk Siantan Cukup baik, Hal ini terbukti dengan banyaknya responden yang menilai cukup baik sebanyak 288 orang dengan persentase 39.51%.
2. Walaupun pelaksanaan bantuan RRTLH cukup baik, namun masih terdapat berbagai macam hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun hambatan-hambatan tersebut yaitu:
 - a. Kurang maksimalnya pelaksanaan musyawarah Desa (Musdes) yang merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi. Dalam hal ini aparat desa harus mampu untuk lebih memaksimalkan lagi supaya pihak

yang terlibat seperti masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara maksimal. Sehingga pelaksanaan bantuan ini lebih transparan.

- b. Tidak adanya pembentukan Kelompok penerima bantuan karena tugas dari kelompok ini sangatlah penting. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut Kepala Desa yang melakukan pekerjaan tersebut.;
- c. Kurangnya maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab seperti Dinas Sosial dalam pembangunan rumah, sehingga terdapat rumah yang telah mendapatkan bantuan namun belum ada perbaikan yang seperti yang diharapkan.
- d. Kurang selektifnya Dinas Sosial menetapkan penerima bantuan RRTLH sehingga ada penerima dengan pendapatan yang tetap dan lebih tinggi mendapatkan bantuan RRTLH.
- e. Pada kegiatan sarana prasarana masih juga terdapat kendala seperti susuhnya untuk mendapatkan bahan utama dalam pembangunan, seperti kayu. Dan juga akibat langkanya bahan utama maka untuk mendapatkannya harus membayar dengan harga yang sangat tinggi.

6.2 Saran

Demi tercapainya pelaksanaan bantuan RRTLH di Desa Teluk Siantan yang lebih baik lagi, penulis ingin member saran kepada pihak-pihak yang terkait di Desa Teluk Siantan:

1. Agar pelaksanaan bantuan dapat berjalan dengan maksimal maka persyaratan dan ketentuan lebih di sosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman dalam masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan kegiatan.

2. Agar membentuk kelompok penerima bantuan, sehingga masyarakat bisa mengelola sendiri bantuan RRTLH yang di berikan. Karena masyarakat lebih mengetahui calon-calon penerima bantuan RRTLH di Desa Teluk Siantan.
3. Dalam penetapan penerima bantuan RRTLH agar lebih memperhatikan Kriteria-kriteria dalam penerima bantuan, sehingga bantuan yang di berikan tepat pada sasaran yaitu kepada orang yang berpenghasilan rendah dan orang yang mempunyai rumah yang sudah tidak layak lagi untuk dihuni.
4. Kepada para penerima bantuan hendaknya menjadikan bantuan RRTLH sebagai awal untuk menciptakan rumah yang layak huni. Bantuan yang diberikan diharapkan menjadi starter untuk meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Harus ada pengawasan baik itu dari Dinas Sosial, Kepala Desa, maupun masyarakat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Teluk Siantan sehingga pelaksanaan bantuan RRTLH ini sesuai dengan apa yang diharapkan.
6. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang masih ada dalam hal melaksanakan kegiatan, seharusnya kepala Desa membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya membangun untuk kelancaran pelaksanaan bantuan RRTLH kedepanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solichin. 2005. *Analisis kebijaksanaan : formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi aksara.
- Ahadi Nofri. 2004. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Unri Press.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kumorotomo, Wahyudi. 2002. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Luthans, Fred. 2006. *Prilaku Organisasi*. Andi Jogjakarta
- Makmur. 2007. *Manajemen Pembangunan (Memadukan ilmu dan praktek)* Jakarta.
- Santoso, Jo et al. 2002. *Sitem perumahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi perkotaan UI dan Ikatan Ahli Perencanaan.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabetta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sutarto. 1993. *dasar-dasar organisasi*. Yogyakarta : gajah mada university press
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2002. *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Riady. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Widjjaja. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*.
Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

Departemen Kesehatan Republik Indonesia:2002

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 18 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor: 08/Permen/2006

Peraturan Bupati Nomor:07 Tahun 2011.